



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 1 Telepon 314246 Fax 314246
A M B O N 97124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU
NOMOR : 04/Ro.Org/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU TAHUN 2021

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Biro Organisasi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2021. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Biro Organisasi Setda Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 08 Januari 2021


Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710924 199101 1 003

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
 SETDA MALUKU
 NOMOR: 04/Ro.Org/I/2021
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU
 TAHUN 2019-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU TAHUN 2021**

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Meningkatnya Implementasi SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	(Jumlah OPD yang menyusun dokumen PK sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku : Total OPD yang menyusun dokumen PK) x 100% * Total OPD = 35 OPD	Bagian Pengembangan Kinerja	Dokumen PK OPD
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen LKIP sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	(Jumlah OPD yang menyusun dokumen LKIP sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku : Total OPD yang menyusun dokumen LKIP) x 100% * Total OPD = 35 OPD	Bagian Pengembangan Kinerja	Dokumen LKIP OPD

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Provinsi Maluku	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	(Jumlah OPD penyelenggara layanan publik dengan IKM baik : Total OPD penyelenggara layanan publik) x 100% * Total OPD penyelenggara layanan publik = 35 OPD	Bagian Tatalaksana	Laporan IKM OPD Penyelenggara Layanan Publik
			Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "Baik"	(Jumlah Pemda Kab/Kota se-Maluku dengan IKM baik : Total Pemda Kab/Kota se- Maluku) x 100% * Total Kab/Kota = 11	Bagian Tatalaksana	Laporan IKM OPD Penyelenggara Layanan Publik Pemda Kab/Kota
			Persentase Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik	(Jumlah OPD Penyelenggara layanan publik yang memiliki inovasi pelayanan publik : Total OPD penyelenggara layanan publik) x 100% * Total OPD penyelenggara layanan publik = 35 OPD	Bagian Tatalaksana	Proposal Inovasi Pelayanan Publik OPD

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
			<p>Persentase Perangkat Daerah yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan - Standar Operasional Prosedur - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Peta Proses Bisnis 	<p>(Jumlah OPD yang telah memiliki kebijakan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku : Total OPD) x 100%</p>	Bagian Tatalaksana	Laporan kegiatan
			<p>Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku yang telah Memiliki Kebijakan Pelayanan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan - Standar Operasional Prosedur - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Peta Proses Bisnis 	<p>(Jumlah Pemda Kab/Kota yang telah memiliki kebijakan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku : Total OPD) x 100%</p>	Bagian Tatalaksana	Laporan kegiatan

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
3.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	(Jumlah OPD yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran : Total OPD) x 100% * Total OPD Provinsi = 35 OPD	Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Maluku dan Pergub tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja OPD Provinsi Maluku
			Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Kelembagaannya Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	(Jumlah Kab/Kota yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran : Total Kab/Kota) x 100% * Total Kab/Kota = 11 Kab/Kota	Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Perbup dan Perwal tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja OPD Kab/Kota
		Meningkatnya Penataan Pegawai sesuai Hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan	Persentase Jabatan ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan :	(Jumlah ASN pada Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku yang dilakukan penataan Anjab dan ABK, Standara Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan : Total	Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan	- Pergub tentang Analisa Jabatan - Pergub tentang Analisa Beban Kerja - Pergub tentang Standar Kompetensi Jabatan

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
			1. Anjab & ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	ASN Lingkup Perangkat Daerah Pemda Provinsi Maluku)		- Pergub tentang Evaluasi Jabatan
			Persentase Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan : 1. Anjab & ABK 2. Standar Kompetensi Jabatan 3. Evaluasi Jabatan	(Jumlah Pemda Kab/Kota se-Provinsi Maluku yang telah dilakukan penataan; Anjab & ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan : Total Kab/Kota) x 100%	Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan	- Perbup/Perwali tentang Analisa Jabatan - Perbup/Perwali tentang Analisa Beban Kerja - Perbup/Perwali tentang Standar Kompetensi Jabatan - Perbup/Perwali tentang Evaluasi Jabatan


 Kepala Biro Organisasi
 Setda Maluku

Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710924 199101 1 003